

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2016



**INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
FEBRUARI 2016**

**ISBN :
No. Publikasi : 82520.1609
Katalog BPS : 2302003.82
Ukuran Buku : B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman : 27**

**Naskah :
Bidang Statistik Sosial**

**Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara**

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

<http://malut.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Februari 2016 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Februari 2016. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Ternate, Juli 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

<http://malut.bps.go.id>

DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA	6
INDIKATOR PENGANGGURAN	14
LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK	19

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

<http://malut.bps.go.id>

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER I TAHUN 2016

UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986–1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994–2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005–2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara Sakernas Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar 200.000 rumah tangga, dimana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.

Provinsi Maluku Utara sampel terpilih untuk Sakernas Februari 2016 berjumlah 640 rumah tangga. Dengan jumlah sampel tersebut hasil Sakernas tabel-tabel yang disajikan dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan daerah (perkotaan dan perdesaan), dengan penomoran tabel yang dimulai dengan tabel total.

Jumlah sampel
untuk Sakernas
Februari 2016 sebanyak
640 rumah tangga

TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data hasil Sakernas Februari 2015 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

CAKUPAN

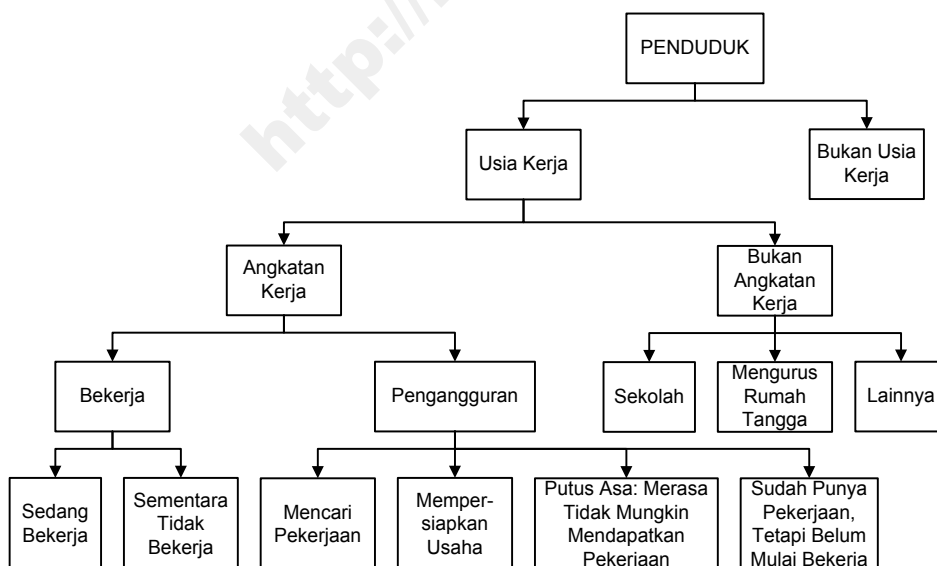
Pembahasan hasil Sakernas Februari 2015 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan untuk melihat perkembangannya. Sedangkan untuk melihat keterbandingan antar daerah, beberapa data dan ulasan disajikan menurut kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterbandingan antar Negara. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambar 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN



Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah satu minggu. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

PARTISIPASI DUNIA KERJA

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

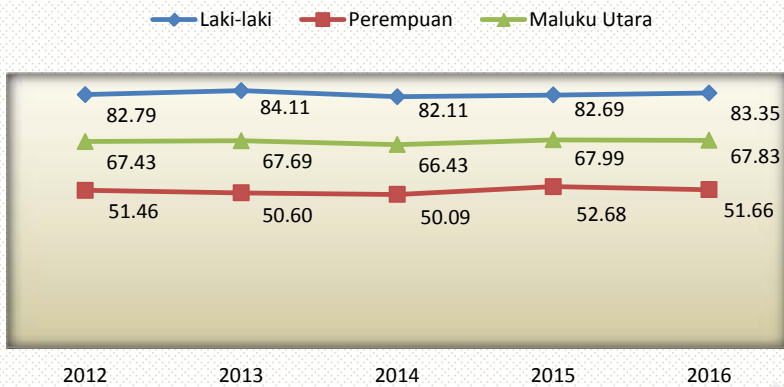
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK dihitung dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas)

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja (termasuk didalamnya adalah yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan penganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Gambar 1. TPAK menurut Jenis Kelamin, 2012-2016



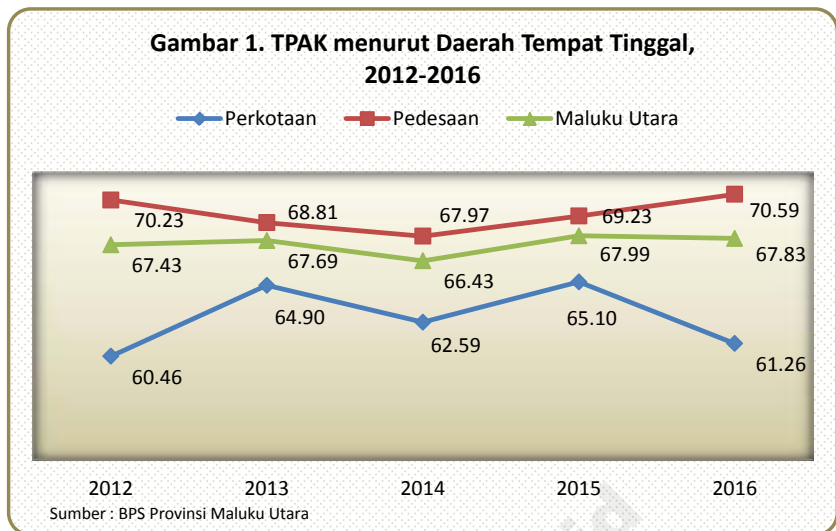
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Pasokan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai yaitu selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Pada Februari 2016, TPAK Maluku Utara mencapai 67,83 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (67,99 %). Angka tersebut berarti dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 68 orang. Sedangkan 32 orang lainnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

TPAK laki-laki pada Februari 2016 nilainya lebih besar dibanding TPAK perempuan. Pada Februari 2016 TPAK laki-laki sebesar 83,35 persen yang sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya (82,69 %). Sementara itu, TPAK perempuan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 52,68 persen pada Februari 2015 menjadi 51,66 persen pada Februari 2016.

Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Maluku Utara selama lima tahun terakhir selalu jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari nilai TPAK yang dihasilkan dimana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di kisaran 50 persen. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Maluku Utara masih didominasi oleh laki-laki.

Pada Februari 2016, TPAK Maluku Utara mencapai 67,83 persen



Proporsi penduduk usia kerja yang mengisi pasar tenaga kerja di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan.

Pasar tenaga kerja di Maluku Utara bisa kita lihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Pada Gambar 2 terlihat bahwa proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja selama lima tahun terakhir fluktuatif. Namun selama setahun terakhir terjadi sedikit penurunan pasokan tenaga kerja. Di Maluku Utara pasokan tenaga kerja di daerah pedesaan selalu lebih besar dibanding di perkotaan baik laki-laki maupun perempuan (Tabel 1.). Hal ini bisa disebabkan karena di pedesaan pasokan tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi lebih produktif walaupun penghasilan tidak sebesar di perkotaan akan tetapi digunakan agar pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat berlangsung. Selain itu juga bisa disebabkan karena angkatan kerja di desa tidak terlalu membutuhkan jam pekerjaan yang tetap, apalagi rata-rata pekerjaan di sektor informal yang juga fleksibel, seperti bekerja di ladang, membuat kerajinan dan berdagang.

Tabel 1. TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2016

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota	78.24	43.92	61.26
Desa	85.46	54.95	70.59
Total	83.35	51.66	67.83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan (persen)
di Provinsi Maluku Utara, Februari 2014-Februari 2016

Tingkat Pendidikan	Februari 2014	Februari 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	42.62	41.15	36.71
SMP	16.68	18.05	16.67
SMA Umum	23.5	24.02	25.59
SMA Kejuruan	5.77	4.87	6.02
Diploma I/II/III	3.84	3.36	3.52
Universitas	7.59	8.55	11.49
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jika kita telusuri berdasarkan tingkat pendidikannya pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) Ke bawah yang mencapai 36,71 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia kerja yang memutuskan untuk masuk pasar tenaga kerja baik sebagai pekerja maupun pencari kerja meskipun dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah, yaitu SD ke bawah. Kondisi ini masih umum terjadi di Maluku Utara. Dominasi sektor pertanian yang dikelola secara tradisional menyebabkan pendidikan masih belum dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan.

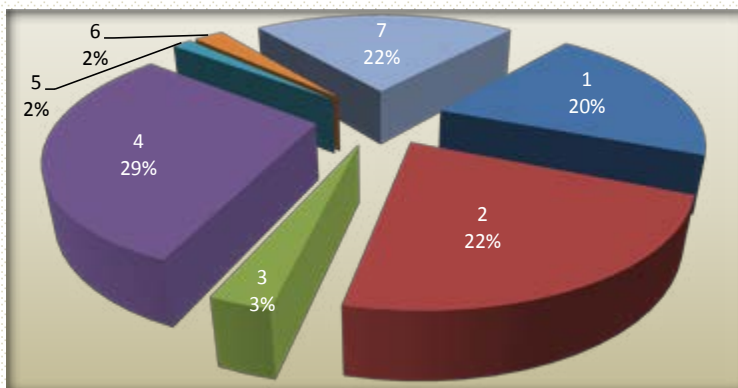
Pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) Ke bawah yang mencapai 36,71 persen

PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA

a. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan kemajuan pembangunan, suatu daerah biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Gambar 3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2016



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Sepertiga penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Kategori status Pekerjaan Utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar
4. Buruh/karyawan
5. Pekerja bebas pertanian
6. Pekerja bebas non pertanian
7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Maluku Utara, Februari 2014-Februari 2016

Status Pekerjaan Utama	Februari 2014	Februari 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Berusaha sendiri	22.13	20.85	20.20
2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	21.42	21.59	22.15
3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1.95	3.03	2.83
4 Buruh/karyawan/pegawai	32.02	28.66	29.43
5 Pekerja bebas di pertanian	2.92	3.28	1.53
6 Pekerja bebas di non pertanian	2.17	2.86	2.37
7 Pekerja keluarga/tidak dibayar	17.39	19.73	21.49
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil Sakernas Semester I 2016, di antara tujuh kategori status pekerjaan, buruh/karyawan/pegawai tercatat yang terbanyak yaitu sebesar 28,66 persen. Sementara terbanyak kedua adalah penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/pegawai keluarga/tidak dibayar sebesar 22,15 persen. Kelompok penduduk lainnya yang proporsinya paling rendah ialah pekerja bebas di pertanian, yaitu sebesar 1,53 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2016

Status Pekerjaan Utama	Daerah Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Berusaha sendiri	21.42	19.76	23.28	14.78	20.20
2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	11.79	25.90	26.25	14.92	22.15
3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3.61	2.55	3.35	1.92	2.83
4 Buruh/karyawan/pegawai	45.29	23.70	30.12	28.21	29.43
5 Pekerja bebas di pertanian	0.21	2.00	2.18	0.37	1.53
6 Pekerja bebas di non pertanian	6.07	1.03	3.44	0.49	2.37
7 Pekerja keluarga/tidak dibayar	11.61	25.06	11.38	39.31	21.49
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, pekerja di perkotaan sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu mencapai 45,29 persen. Sementara kelompok penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas di pertanian menjadi yang paling rendah nilainya, yaitu hanya 0,21 persen. Sedangkan pekerja di pedesaan cenderung merata dimana persentasenya tidak jauh berbeda antara penduduk yang berstatus berusaha sendiri (19,76 %), berusaha dibantu buruh tidak tetap/pegawai keluarga/tidak dibayar (25,90 %), Buruh/karyawan/pegawai (23,70 %) dan pekerja keluarga/tidak dibayar (25,06 %).

Sementara berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki paling banyak sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 30,12 persen. Sedangkan pekerja perempuan sebagian besar adalah pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 39,31 persen.

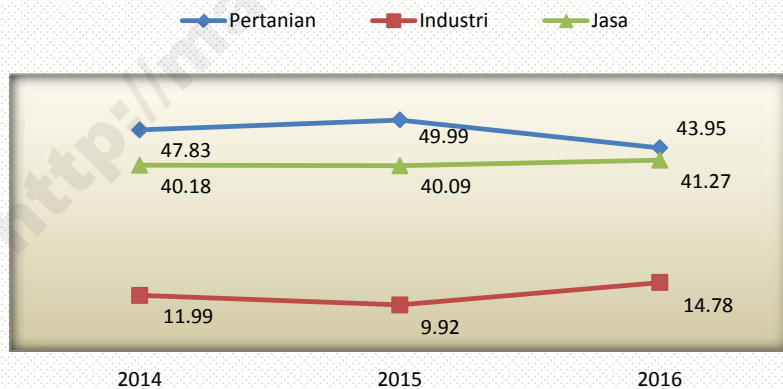
b. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang banyak menyerap tenaga kerja

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *Agriculture*, *Manufacture* dan *Services*, berdasarkan pada definisi sektor *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC) System*. Lapangan usaha Pertanian atau *Agriculture* terdiri dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Lapangan usaha Industri atau *Manufacture* terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, dan konstruksi. Lapangan usaha Jasa-jasa atau *Services* adalah selain Pertanian dan Industri.

Gambar 4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2014-Februari 2016



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Meskipun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, sektor pertanian masih menjadi karakteristik lapangan usaha terbesar di Maluku Utara. Selama tiga tahun terakhir tercatat persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian meningkat di 2015 , yaitu sebesar 49,99 persen dibandingkan pada 2014 dengan nilai sebesar 47,83 persen. Sedangkan pada 2016 kembali menurun sebesar 6,04 persen menjadi 43,95 persen

Sektor jasa (*services*) menjadi lapangan usaha terbesar kedua di Maluku Utara pada 2016, yaitu mencapai 41,27 persen. Sedangkan sektor industri (*manufacture*), meskipun menjadi lapangan usaha paling kecil proporsinya, terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 14,78 persen di 2016

Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian,

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2016

Lapangan Usaha	Daerah Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	11.55	55.65	46.28	39.83	43.95
Industri	14.35	14.95	16.51	11.75	14.78
Jasa	74.10	29.40	37.21	48.42	41.27
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilihat dari lapangan usahanya hampir separuhnya yaitu mencapai 49,99 persen bekerja di sektor pertanian. Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan lapangan pekerjaan antara di perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah perkotaan lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor S(*ervices*)/jasa-jasa , dimana 71,95 persen dari penduduk yang bekerja bekerja di sektor ini, sementara untuk wilayah perdesaan sektor A(*griculture*)/Pertanian tetap mendominasi dalam kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mampu menampung 62,86 persen. Sedangkan untuk manufaktur masih relatif sama antara desa dan kota.

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa. Dimana proporsi laki-laki dan perempuan di dua sektor tersebut tidak jauh berbeda. Lain halnya dengan sektor industri. Sektor industri lebih banyak menyerap pekerja laki-laki, yaitu dua kali lipat lebih banyak dari tenaga kerja perempuan.

c. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu yang lalu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Dengan melihat jumlah jam kerja selama seminggu terakhir dari penduduk yang bekerja, kita dapat mengetahui proporsi penduduk yang bekerja sebagai pekerja murni/ paruh waktu/ pekerja tidak penuh sukarela dan proporsi penduduk yang bekerja namun dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full Time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun jika pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup itu termasuk pekerja paruh waktu (*Part Time Worker*)

Tabel 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Provinsi Maluku Utara, Februari 2014-Februari 2016

Rincian	Februari 2014	Februari 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Bekerja	465 486	490 152	512 511
Setengah Penganggur	61 915	76 835	58 219
Pekerja Paruh Waktu	119 032	102 692	121 268
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	180 947	179 527	179 487
Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	13.3	15.68	11.36
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	25.57	20.95	23.66
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	38.87	36.63	35.02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara terus mengalami penurunan, dari 38,87 persen di 2014 menjadi 36,63 persen di 2015 dan 35,02 persen di 2016. Pekerja tidak penuh ini terdiri dari pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pekerja setengah penganggur sempat meningkat di 2015, namun kembali menurun di 2016 menjadi 11,36 persen. Sementara itu, tingkat pekerja paruh waktu selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Menurun di 2015 sebesar 20,95 persen dan kembali meningkat di 2016 menjadi sebesar 23,66 persen.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara terus mengalami penurunan.

Berdasarkan jenis kelamin tingkat pekerja tidak penuh perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki mencapai 49,35 persen dimana pekerja perempuan ini lebih memilih menjadi pekerja paruh waktu. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya ternyata tingkat pekerja tidak penuh di desa jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yaitu di desa mencapai 39,45 persen.

Tabel 7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2016

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk yang Bekerja	136 031	376 480	327 028	185 483	512 511
Setengah Penganggur	11 299	46 920	36 385	21 834	58 219
Pekerja Paruh Waktu	19 683	101 585	51 574	69 694	121 268
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	30 982	148 505	87 959	91 528	179 487
Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	8.31	12.46	11.13	11.77	11.36
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	14.47	26.98	15.77	37.57	23.66
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	22.78	39.45	26.90	49.35	35.02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

d. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik atau pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Hampir separuh penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Tabel 8. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara, Februari 2014-Februari 2016

Tingkat Pendidikan	Februari 2014	Februari 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	43.79	42.59	37.50
SMP	17.36	18.13	17.25
SMA Umum	21.30	23.23	25.18
SMA Kejuruan	3.83	4.75	5.88
Diploma I/II/III	3.70	2.93	3.15
Universitas	10.02	8.37	11.04
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Selama periode Februari 2014 sampai Februari 2016, sebagian besar penduduk yang bekerja di Maluku Utara adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu mencapai 37,50 persen di 2016. Hal ini menggambarkan bahwa pasokan angkatan kerja atau SDM yang ada di Maluku Utara sebagian besar adalah lulusan SD ke bawah.

Terbesar kedua adalah pekerja lulusan SMA Umum yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, yaitu 21,30 persen di 2014, 23,23 persen di 2015, dan 25,18 persen di 2016. Penduduk yang berpendidikan SMP menempati urutan ketiga terbesar, yaitu mencapai 17,25 persen di 2016. Hal ini menunjukkan tenaga kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah kebawah.

Tabel 9. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2016

Tingkat Pendidikan	Daerah Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	19.28	44.08	34.51	42.76	37.50
SMP	16.58	17.50	16.96	17.77	17.25
SMA Umum	34.79	21.71	27.99	20.23	25.18
SMA Kejuruan	7.41	5.33	7.66	2.76	5.88
Diploma I/II/III	2.85	3.26	2.42	4.44	3.15
Universitas	19.09	8.12	10.46	12.04	11.04
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Menurut daerah tempat tinggal, hampir setengah dari penduduk yang bekerja di wilayah desa berpendidikan SD kebawah, yaitu mencapai 44,08 persen. Sementara di wilayah kota, kelompok terbesar penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SMA Umum, yaitu sebesar 34,79 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan, masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD kebawah, yaitu 34,51 persen untuk laki-laki dan 42,76 persen untuk perempuan.

INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

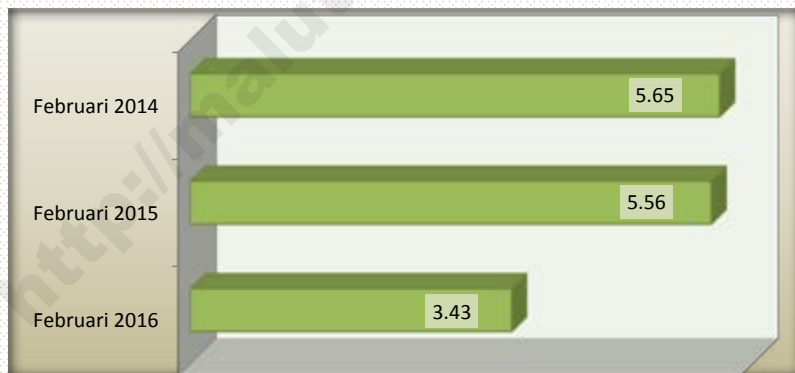
TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, tingkat kemiskinan “tidak selalu”

*T i n g k a t
Pengangguran Terbuka
(TPT) menggambarkan
proporsi angkatan kerja
yang tidak memiliki
pekerjaan yang secara
aktif mencari kerja/
mempersiapkan usaha.*

berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih tinggi) meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara si miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan mencari pekerjaan

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara, Februari 2014-Februari 2016



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Pada semester I 2016, TPT Maluku Utara adalah sebesar 3,43 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara yang termasuk kategori penganggur ada sekitar 3 sampai 4 orang. Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, TPT di Maluku Utara mengalami penurunan. Pada Februari 2014 TPT Maluku Utara masih berada pada nilai 5,65 persen. Kemudian sedikit menurun pada Februari 2015 menjadi 5,56 persen, dan secara signifikan menurun pada Februari 2016 menjadi 3,43 persen.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2014-Februari 2016

Tahun	Daerah Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari 2014	10.50	3.85	4.00	8.47	5.65
Februari 2015	7.22	4.89	5.02	6.43	5.56
Februari 2016	3.99	3.23	1.73	6.28	3.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan. Dalam tiga tahun terakhir tingkat pengangguran di perkotaan terus mengalami penurunan, dari 10,50 persen pada Februari 2014. Kemudian menjadi 7,22 persen pada Februari 2015, dan kembali berkurang pada Februari 2016 menjadi 3,99 persen. Sedangkan di wilayah pedesaan, tingkat pengangguran pada Februari 2014 tercatat sebesar 3,85 persen. Kemudian meningkat pada Februari 2015 menjadi 4,89 persen dan menurun menjadi 3,23 persen pada Februari 2016.

T i n g k a t pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan.

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Februari 2016

Tingkat Pendidikan	Daerah Tempat Tinggal		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	2.52	1.17	0.42	2.66	1.36
SMP	0.24	-	0.10	-	0.06
SMA Umum	4.15	5.44	2.27	10.96	4.97
SMA Kejuruan	-	8.11	5.14	7.48	5.55
Diploma I/II/III	6.22	15.85	7.68	18.83	13.72
Universitas	9.15	5.59	3.11	12.97	7.26
Total	3.99	3.23	1.73	6.28	3.43

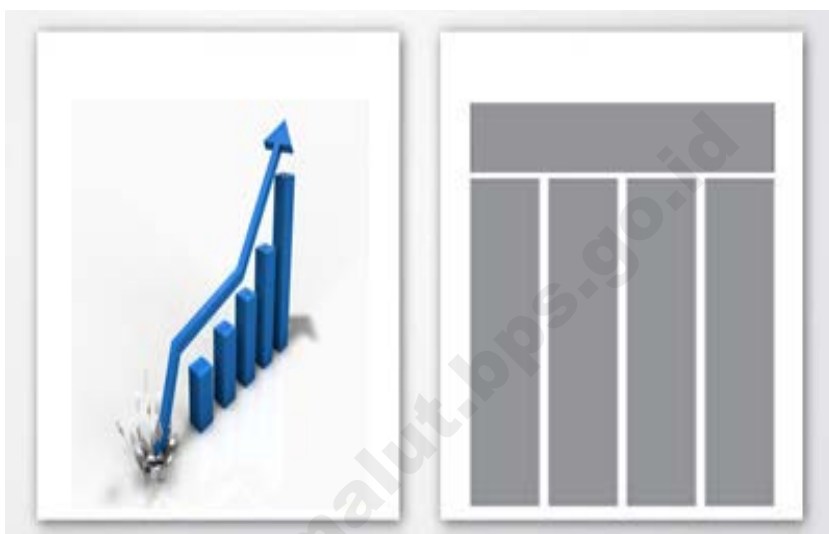
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

*T i n g k a t
pengangguran tertinggi
adalah lulusan diploma
I/II/III yaitu mencapai
13,72 persen.*

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan diploma I/II/III yaitu mencapai 13,72 persen. Dimana mereka sebagian besar berada di wilayah pedesaan, yaitu mencapai 15,85 persen. Sedangkan peringkat kedua penyumbang tingkat pengangguran di Maluku Utara adalah lulusan universitas, yaitu mencapai 7,26 persen. Kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang dirasa cukup tinggi serta terlalu memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih rendah) cenderung membuat para lulusan diploma I/II/III dan lulusan universitas ini melewati lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah. Apabila dilihat dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan, maka dapat dikatakan tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai untuk lulusan diploma I/II/III dan lulusan universitas.

Berdasarkan jenis kelamin, lulusan diploma I/II/III, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran di Maluku Utara. Pada Februari 2016 tercatat tingkat pengangguran lulusan diploma I/II/III adalah sebesar 7,68 persen untuk penduduk laki-laki dan 18,83 persen untuk penduduk perempuan.

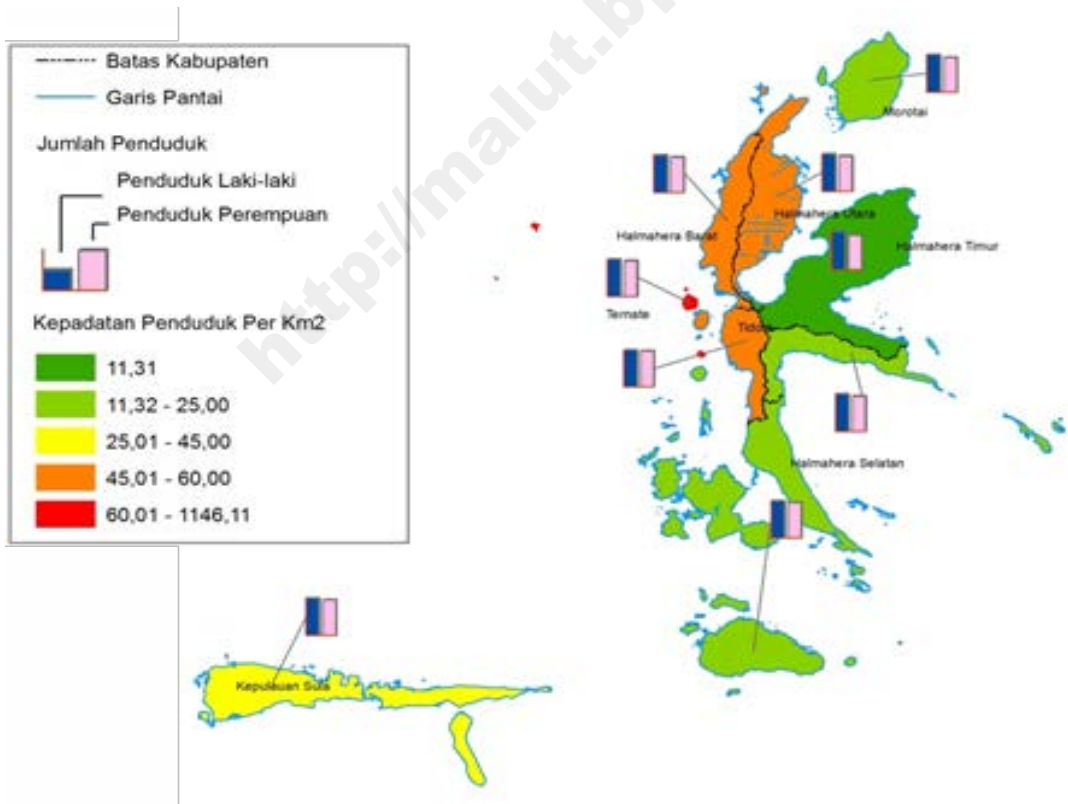
LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK



Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2012-2015

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	104 807	106 791	108 769	110 717
Halmahera Tengah	45 712	47 079	48 414	49 807
Kepulauan Sula	89 374	91 406	93 435	95 285
Halmahera Selatan	207 728	211 682	215 791	219 836
Halmahera Utara	169 599	173 117	176 573	180 100
Halmahera Timur	78 112	80 526	82 914	85 188
Pulau Morotai	55 998	57 565	59 102	60 727
Pulau Taliabu	48 880	49 510	50 067	50 709
Ternate	197 566	202 728	207 789	212 997
Tidore Kepulauan	93 299	94 493	95 813	96 979
Maluku Utara	1 091 075	1 114 897	1 138 667	1 162 345

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara



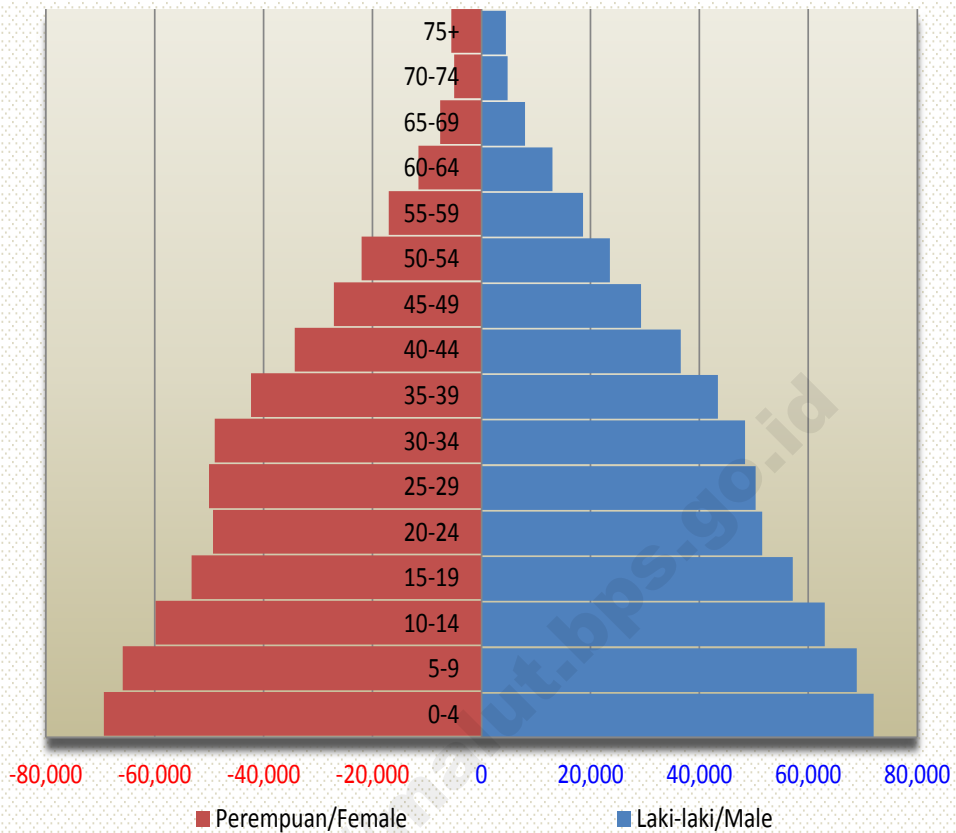
Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin, 2015

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	72 017	69 333	141 350
5-9	68 881	65 878	134 759
10-14	63 011	59 828	122 839
15-19	57 158	53 255	110 413
20-24	51 522	49 287	100 809
25-29	50 302	50 028	100 330
30-34	48 366	48 978	97 344
35-39	43 425	42 317	85 742
40-44	36 599	34 311	70 910
45-49	29 312	27 129	56 441
50-54	23 588	22 040	45 628
55-59	18 663	17 037	35 700
60-64	13 048	11 601	24 649
65-69	8 017	7 580	15 597
70-74	4 810	4 993	9 803
75+	4 478	5 553	10 031
Jumlah	593 197	569 148	1 162 345

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2015



Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Februari 2014-Februari 2016

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2014	Februari 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	742 722	763 299	782 438
2. Angkatan Kerja	493 357	518 982	530 721
Bekerja	465 486	490 152	512 511
Penganggur	27 871	28 830	18 210
3. Bukan Angkatan Kerja	249 365	244 317	251 717
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66.43	67.99	67.83
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.65	5.56	3.43
6. Pekerja Tidak Penuh	180 947	179 527	179 487
Setengah Penganggur	61 915	76 835	58 219
Paruh Waktu	119 032	102 692	121 268

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 5 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara, Februari 2015-Februari 2016

Tingkat Pendidikan	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	42.59	40.84	37.50
Sekolah Menengah Pertama	18.13	18.20	17.25
Sekolah Menengah Atas	23.23	24.40	25.18
Sekolah Menengah Kejuruan	4.75	4.32	5.88
Diploma I/II/III	2.93	3.02	3.15
Universitas	8.37	9.23	11.04
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama
di Provinsi Maluku Utara, Februari 2015-Februari 2016

Lapangan Usaha	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	49.99	50.23	43.95
2 Pertambangan dan Penggalian	3.38	2.46	4.06
3 Industri	1.82	3.60	5.15
4 Listrik, Gas, dan Air Minum	0.04	0.25	0.60
5 Konstruksi	4.68	4.82	4.99
6 Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	14.86	13.20	14.67
7 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.40	6.61	6.34
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.91	1.27	1.58
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan	17.93	17.56	18.67
Total	100.00	100.00	100.00

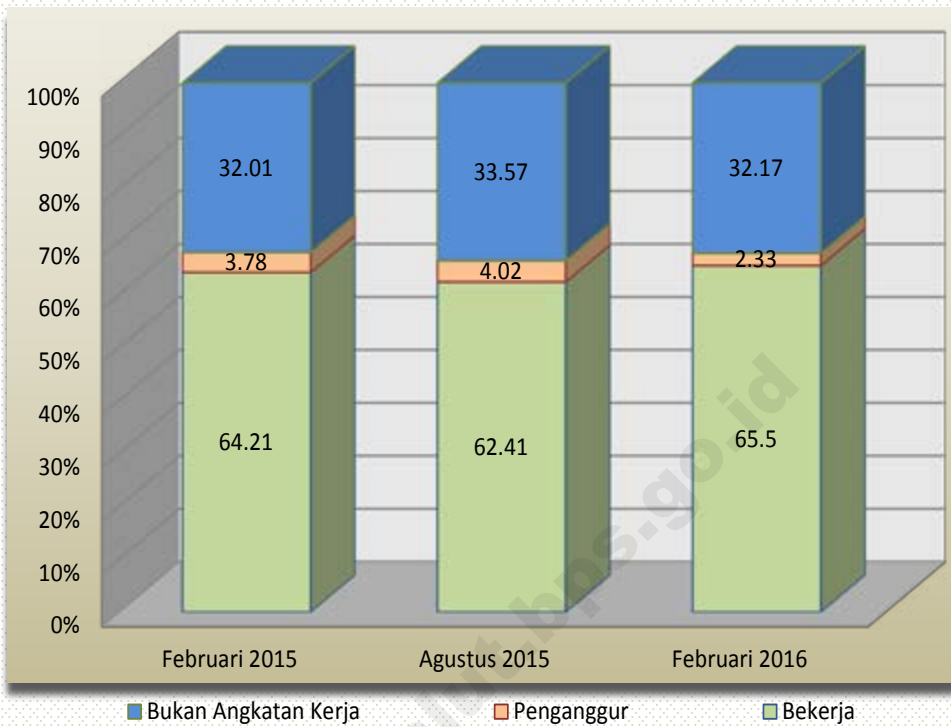
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara, Februari 2015-Februari 2016

Tingkat Pendidikan	Februari 2015	Agustus 2015	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	2.25	2.04	1.36
Sekolah Menengah Pertama	5.12	3.96	0.06
Sekolah Menengah Atas	8.66	11.00	4.97
Sekolah Menengah Kejuruan	7.92	11.32	5.55
Diploma I/II/III	17.64	8.25	13.72
Universitas	7.55	9.75	7.26
Total	5.56	6.05	3.43

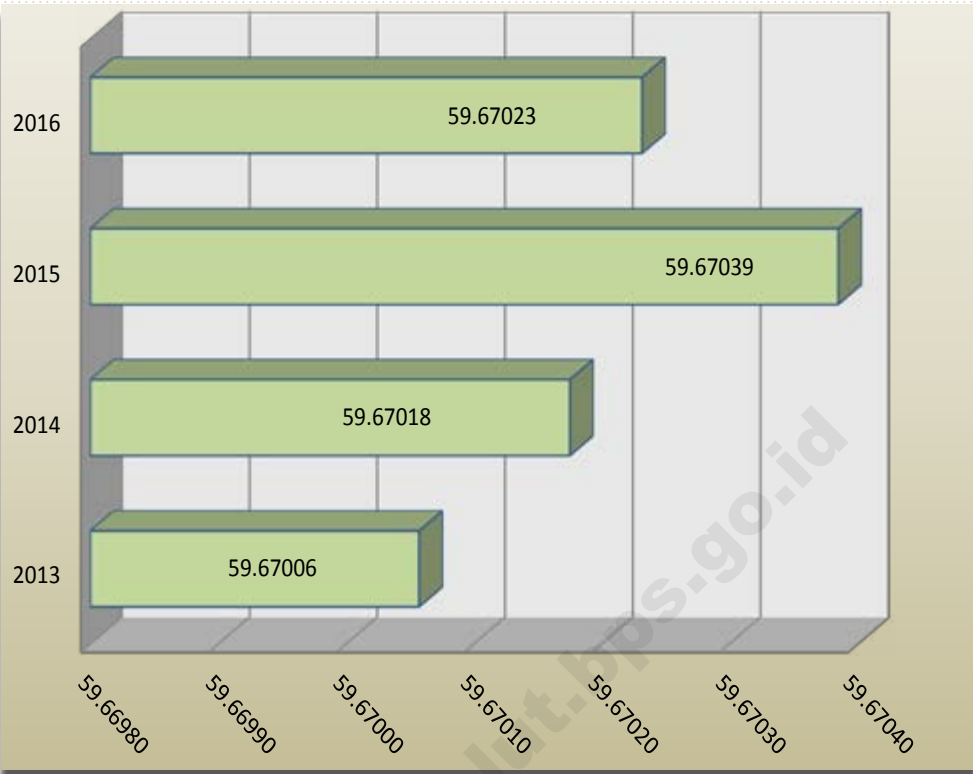
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Maluku Utara, Februari 2015-Februari 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Rasio Ketergantungan Provinsi Maluku Utara, Februari 2013-Februari 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) memberikan gambaran kasar beban ekonomi yang dihadapi suatu populasi. Angka ini secara umum memperlihatkan seberapa banyak penduduk usia tidak produktif yang menjadi beban tanggungan bagi penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan Maluku Utara pada Tahun 2015 sebesar 59,67023 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Maluku Utara akan memiliki tanggungan sebanyak 59 sampai 60 penduduk tidak produktif.

Berdasarkan hasil proyeksi, rasio ketergantungan ini akan terus menurun secara perlahan menuju kondisi "Bonus Demografi", yakni kondisi dimana rasio ketergantungan berada pada kisaran 50. Dengan kata lain, dalam kondisi tersebut, setiap 2 orang penduduk usia produktif hanya menanggung 1 orang penduduk usia tidak produktif, sehingga berpotensi memiliki dampak positif terhadap perekonomian.

- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
 - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate - 97712

Telp : (0921) 3127878, Fax : (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : bps8200@bps.go.id